



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



Wujudkan Swasembada Pangan dengan Ciptaung Rongga

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER PERIKANAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERIKANAN BUNGLANG
KALIMANTAN SELATAN
2025**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2025 merupakan laporan serangkaian kegiatan pelatihan beserta kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binnuang dalam rentang periode Januari s.d. Desember Tahun 2025. Di periode tersebut BBPP Binnuang sebagai UPT pelatihan pertanian BPPSDMP Kementerian senantiasa berupaya untuk membangun konteks pelatihan yang didasari oleh relevansi *ter-up to date* serta guna mendukung program swasembada pangan nasional seperti penguatan kapasitas SDM brigade pangan dan pendamping dengan tata kelola yang luhur dan sistematis serta dapat menginspirasi semua *stakeholders* pertanian sekaligus mensupport program swasembada pangan nasional.

BBPP Binnuang juga berkomitmen memfasilitasi pengembangan SDM Pertanian baik institusi, lembaga / P4S, ataupun kelompok tani / brigade pangan di regional Kalimantan. Dengan kegiatan pelatihan SDM diharapkan produktifitas pertanian, IP, serta LTT dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja yang lebih baik.

Besar harapan kami Laporan Kinerja BBPP Binnuang Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran kinerja Balai terutama dalam mensukseskan program swasembada pangan yang sekaligus merupakan fondasi penting bagi ketahanan pangan nasional.



Binnuang, 31 Desember 2025

Kepala Balai

Dr. Arkan, SP, M.Si

NIP. 197110061999031001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BBPP Binuang Tahun 2025 ini merupakan pelaporan serangkaian kegiatan beserta kinerja BBPP Binuang sebagai UPT Badan PPSDMP Kementerian dengan wilayah kerja se-Kalimantan. Dalam rentang periode Januari s.d. Desember Tahun 2025, realisasi anggaran Tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp 11,144,723,000 tercapai Rp 11,140,784,047 atau sebesar 99,96 %.

Hasil pengukuran kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Badan PPSDMP Kementerian dan BBPP Binuang untuk mewujudkan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja sebagai berikut: (A) Sasaran kegiatan meningkatnya kompetensi peserta pelatihan aparatur dengan capaian 19,41 dari target 20% dan non aparatur dengan capaian 24,70 dari target 25; (B) Sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan, dengan capaian 4,56 dari target 4; (C) Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Binuang, dengan capaian IKPA 97,37 dari target 90,00; (D) sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan, dengan capaian 3,95 dari target 3,60. Dengan demikian BBPP Binuang telah Memenuhi Target semua sasaran strategis perjanjian kinerja.

Sedangkan capaian indikator kinerja lainnya sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 437,013.357; (2) Kerjasama program pelatihan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta (3) Prestasi BBPP Binuang lolos seleksi administrasi dengan nomor urut 291 untuk masuk ke tahap penilaian proposal yang akan dilakukan oleh Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKS.	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum BBPP Bhuang	3
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	9
D. Isu Strategis	15
E. Dukungan Anggaran	20
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	22
1. Visi	22
2. Misi	22
3. Tujuan	25
4. Sasaran Program	25
5. Kebijakan Strategis	26
6. Program Kegiatan	27
7. Program dan Kegiatan Tahun 2025	30
B. Perjanjian Kinerja	30
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan	32
B. Capaian Kinerja Organisasi	32
C. Capaian Perjanjian Kinerja	40
D. Capaian Kinerja Lainnya	41
E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	44
 BAB IV. PENUTUP	
 LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
1.	Sebaran, Jumlah dan Klasifikasi P4S	11
2.	Pagu Anggaran BBPP Bhuang Tahun 2025	21
3.	Target Kinerja Badan PPSDMP 2025–2029	28
4.	Perjanjian Kinerja BBPP Bhuang Tahun 2025	31
5.	Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan	33
6.	Capaian Persentase Peserta Yang Meningkatkan Kompetensinya	34
7.	Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Indeks Kepuasan Peserta	35
8.	Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran	35
9.	Realisasi Anggaran BBPP Bhuang	35
10.	Pengolahan Data Kuisioner IKM	39
11.	Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kepuasan Peserta Pelatihan	40
12.	Realisasi Perjanjian Kinerja BBPP Bhuang	40



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal
1.	Struktur Organisasi BBPP Binuang	7
2.	Komposisi Pegawai PNS BBPP Binuang Berdasarkan Golongan	8
3.	Komposisi Pegawai PPPK BBPP Binuang Berdasarkan Golongan	8
3.	Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2025 Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan mencapai swasembada pangan. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras nasional jauh lebih cepat dari target yang ditetapkan, menjadikan tahun ini sebagai tonggak kemandirian pangan. Produksi beras nasional naik signifikan mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36% dari tahun 2024 (30,62 juta ton), menghasilkan surplus 3,52 juta ton dan meminimalisir impor. Keberhasilan ini didukung oleh program strategi tepat sasaran seperti cetak sawah rakyat, optimalisasi lahan rawa, dan perbaikan irigasi dll. Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan simbol kebangkitan pertanian Indonesia dan langkah konkret menuju kemandirian bangsa sebagai lumbung pangan dunia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi mendalam atas tercapainya swasembada pangan pada akhir tahun 2025, yang ia sebut sebagai pencapaian tercepat dalam sejarah Indonesia. Mentan menegaskan bahwa swasembada ini bukan sekadar keberhasilan satu kementerian, melainkan hasil kerja kolektif Kabinet Merah Putih yang lahir dari gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 124,36 poin, angka tertinggi dalam sejarah. Kenaikan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kg juga menjadi bukti keberpihakan pemerintah. Selain itu beliau menyatakan rasa bangganya karena Indonesia berhasil menghentikan impor beras konsumsi pada 2025. *"Indonesia tidak impor lagi. Ini kebanggaan kita semua,"* tegasnya. Beliau juga menekankan bahwa swasembada pangan adalah fondasi bagi kedaulatan bangsa. Menjaga sektor pangan berarti menjaga kehidupan ratusan juta rakyat Indonesia.

Keberhasilan swasembada beras nasional ini adalah hasil kolaborasi antara kementerian (terutama Pertanian dan PU), TNI Polri, serta petani yang bekerja keras, seperti ditekan oleh Presiden Prabowo dan Mentan Amran. Mentan secara khusus berterima kasih kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Indonesia atas dukungan kuat mereka dalam menggerakkan sektor pertanian di daerah masing-masing.



Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dr. Idha Widi Arsanti, SP, MP, memberikan apresiasi tinggi atas tercapainya swasembada pangan pada tahun 2022. Beliau menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari kualitas SDM pertanian Indonesia yang semakin adaptif dan tangguh. Beliau juga menegaskan bahwa teknologi dan mekanisasi tidak akan maksimal tanpa SDM yang mumpuni. Swasembada 2022 adalah hasil dari transformasi petani yang kini lebih adaptif terhadap teknologi digital dan inovasi pertanian modern.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif para penyuluh pertanian di lapangan yang mendampingi petani secara intensif. Idha Widi Arsanti menyebut para penyuluh sebagai "ujung tombak" dalam mengawal implementasi program strategis kementerian, seperti perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan. Beliau mengapresiasi kontribusi signifikan dari petani milenial yang telah membawa semangat baru dalam sektor pertanian, sehingga target swasembada yang semula direncanakan empat tahun dapat dicapai hanya dalam waktu satu tahun. Beliau juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi melalui "Brigade Pangan" dan unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh daerah untuk memastikan keberlanjutan produksi nasional.

BBPP Binnuang sebagai UPT BPPSDMP Kementan turut berperan sebagai pendamping program strategi tepat sasaran seperti cetak sawah rakyat, optimalisasi lahan rawa, dan perbaikan irigasi dll termasuk juga brigade pangan di regional Kalimantan Selatan. Brigade Pangan memiliki dua tujuan utama, selain Mengelola usaha tani secara terstruktur dengan infrastruktur modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, juga mewujudkan agribisnis pertanian modern yang melibatkan generasi muda guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Program yang dilakukan di regional Kalimantan ini tidak hanya mengandalkan alat modern tetapi juga mengembangkan pola kemitraan dengan kelembagaan petani lokal. Brigade Pangan bertindak sebagai integrator yang menghubungkan proses produksi hingga hilirisasi. Dalam mewujudkan tercapainya swasembada pangan nasional perlu sinergi, kolaborasi dan kerjasama lintas sektoral baik dari Kementerian Pertanian sendiri, Kementerian PU, aparat TNI, pemda dan instansi lainnya mengingat swasembada pangan merupakan program nasional.

Sedang melalui program kerjasama edukasi pertanian untuk meningkatkan kapasitas SDM milenial melalui kerjasama kampus merdeka dan sekolah SMK, BBPP Binnuang



mengadakan program magang bagi mahasiswa dan siswa yang akan melakukan praktik kerja. Selama berada di BBPP Bimuang mereka diberikan pelatihan berbagai keterampilan mulai dari memproduksi hasil pertanian, melakukan penanganan pasca panen, pengolahan hasil, pengemasan sampai pemasarannya. Mereka juga dikenalkan dan dilatih mengoperasikan berbagai mekanisasi pertanian yang ada di BBPP Bimuang.

Untuk menyikapi tuntutan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang jumlahnya sangat besar, khususnya bagi pelaku (non aparat) pertanian, semenjak tahun 2006 sampai sekarang 2025, BBPP Bimuang telah menumbuh kembangkan 158 unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar pada 5 (lima) Provinsi se-Kalimantan, terdiri dari Kalimantan Selatan (37 lembaga), Kalimantan Barat (27 lembaga), Kalimantan Utara (16 lembaga), Kalimantan Tengah (40 lembaga) dan Kalimantan Timur (38 lembaga).

Pengelola P4S adalah para petani maju dan berhasil yang diharapkan dapat mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada petani sekitarnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat mendorong percepatan kebutuhan tuntutan peningkatan kapasitas SDM petani yang dilaksanakan melalui kegiatan permagangan/pelatihan. Pembinaan terhadap P4S selama ini yang telah dilakukan berupa mengikut sertakan kegiatan Pelatihan teknis agribisnis, manajemen, Instruktur, dan metodologi pelatihan bagi pengelola P4S, pemberian fasilitasi pendanaan/sharing kegiatan permagangan di P4S, serta pemberian sarana pendukung permagangan/pelatihan.

Demikian pula terhadap SDM aparat bidang pertanian, pelaksanaan pelatihannya juga telah berusaha disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan kompetensi yang diharapkan, berbagai pelatihan teknis dan fungsional yang dilaksanakan baik biaya yang berasal APBN maupun biaya yang berasal dari pihak user (kerjasama pengguna jasa pelatihan), dilaksanakan dengan pengembangan pola dan metode pelatihan, yang dapat melengkapi dan mensinergikan program pusat dan daerah, sekaligus menjadi media sinergi program pusat dan daerah.

B. Kondisi Umum BBPP Bimuang

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Berdasarkan Permentan Nomor 106/Permentan/OT/140/10/2013, tanggal 9 Oktober 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Bimuang, mempunyai Tugas Pokok "*melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparat, pelatihan*



teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian”.

b. Fungsi

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan antara lain:

- a) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama.
- b) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan.
- c) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian.
- d) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur.
- e) Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri.
- f) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- g) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian.
- h) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian.
- i) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian.
- j) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.
- k) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian.
- l) Pelaksanaan bimbingan lanjutan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- m) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- n) Pengelolaan Unit Inkubator Usaha Tani.
- o) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian.
- p) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan.
- q) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis.
- r) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Bimuang.



- 3) Berdasarkan Permentan tersebut diatas, bahwa Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

2. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

BBPP Binuang merupakan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan Unit Kerja eselon II-b dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

Kepala Balai, melaksanakan tugas pimpinan balai :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional dan dalam lingkup area kerja balai.
- Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian.
- Meningkatkan tata kelola anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang.
- Meningkatkan Layanan BBPP Binuang.

Kepala Balai membawahi :

1) Kepala Bagian Umum :

- Meningkatkan kualitas layanan umum.
- Meningkatkan kepuasan publik atas layanan balai.
- Meningkatkan kepuasan internal layanan bagian umum.

Kepala Bagian Umum membawahi :

a. Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha :

- Melaksanakan layanan kepegawaian.
- Melaksanakan tugas manajerial kepegawaian dan RT sesuai penugasan.

b. Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan BMN :

- Melaksanakan kegiatan layanan rumah tangga dan barang milik negara yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.
- Melaksanakan penyelesaian tugas manajerial rumah tangga dan barang milik negara sesuai penugasan.

c. Ketua Tim Kerja Keuangan :

- Melaksanakan kegiatan layanan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.
- Melaksanakan penyelesaian tugas manajerial keuangan sesuai penugasan.



2) Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi :

- Melaksanakan monitoring kinerja anggaran BBFP Binaung sesuai dengan LKE/rencana proyekti.
- Melaksanakan kegiatan layanan program dan evaluasi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.
- Melaksanakan penyelesaian tugas manajerial sesuai penugasan.
- Melaksanakan peningkatan jumlah P4S dan peningkatan kelas klasifikasi P4S.

Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi membawahi :

a. Ketua Tim Kerja Program dan Kerjasama :

- Melaksanakan program dan kerjasama balai, dokumen kehumasan dan publikasi.
- Melaksanakan tugas manajerial program dan kerjasama sesuai penugasan.

b. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Laporan :

- Melaksanakan pemutakhiran data evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala.
- Melaksanakan dokumen layanan evaluasi dan pelaporan.
- Melaksanakan tugas manajerial evaluasi dan pelaporan sesuai penugasan.

3) Ketua Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan :

- Melaksanakan kegiatan layanan penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.

Ketua Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan membawahi :

a. Ketua Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Nonaparatur :

- Melaksanakan kegiatan layanan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan pelatihan aparatur.

b. Ketua Tim Kerja Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis :

- Melaksanakan kegiatan layanan sertifikasi profesi, layanan konsultasi dan pengelolaan inkubator agribisnis.

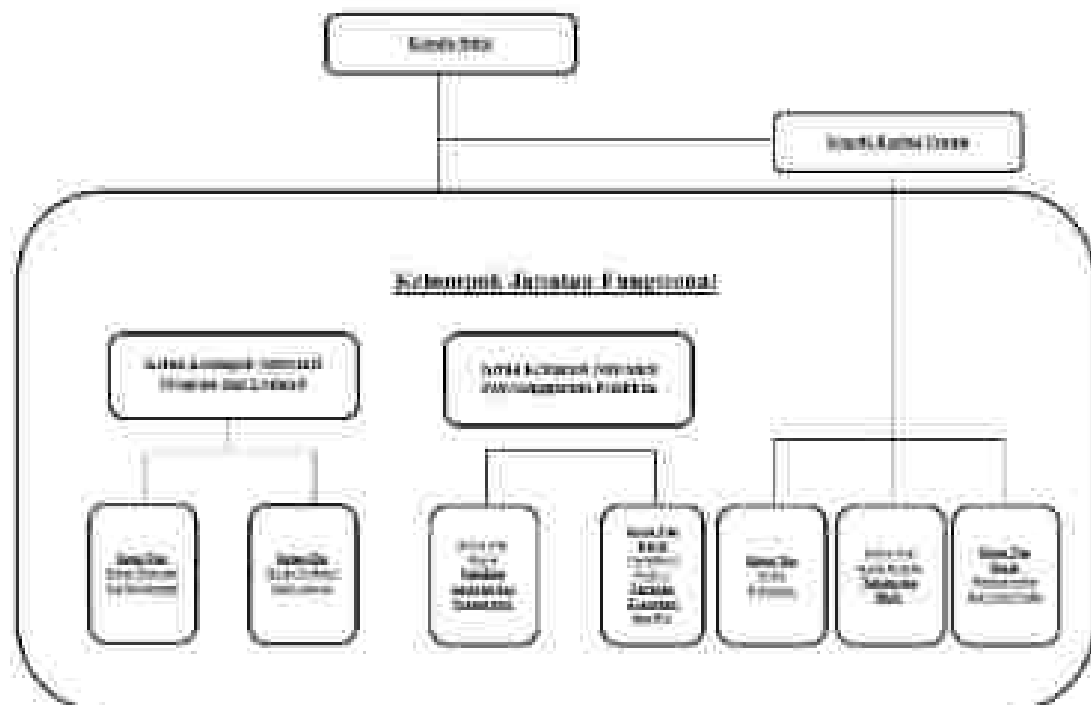
4) Jabatan Fungsional

a. Widyaiswara

- Melaksanakan tatap muka pelatihan beserta presentase SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan.
- Melaksanakan tatap muka pelatihan beserta tingkat kepuasan peserta terhadap Widyaiswara/Fasilitator pelatihan.



- b. **Analisis Pengelolaan Keuangan APBN**
 - Melaksanakan kegiatan layanan Keuangan dan BMN yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.
- c. **Arsiparis**
 - Melaksanakan penataan arsip layanan balai
- d. **Pramata Komputer**
 - Memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi
- e. **Pengelola Perpustakaan**
 - Melakukan laporan layanan administrasi pada masalah perpustakaan.
- a. **Struktur Organisasi**



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPP Binnang

- b. **Sumber Daya Manusia BBPP Binnang**
 - Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPP Binnang didukung oleh 77 karyawan, dengan berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 46 orang aparat serta 31 orang aparat berstatus PPPK (data per 31 Desember 2025), yang terdiri atas 50 Aparat laki-laki dan 27 Perempuan. Komposisi pegawai BBPP Binnang Tahun 2025 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci sebagai berikut:



- 1) Pegawai PNS golongan II sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 23 orang, Golongan IV sebanyak 7 orang, CPNS golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 7 orang.



Gambar 2. Komposisi Pegawai PNS BBPP Binuang Berdasarkan Golongan.

- 2) Pegawai PPPK golongan I sebanyak 2 orang, golongan V sebanyak 20 Orang golongan IX sebanyak 9 orang. Komposisi pegawai BBPP Binuang Per 31 Desember 2025 berdasarkan golongan pada Gambar 3.

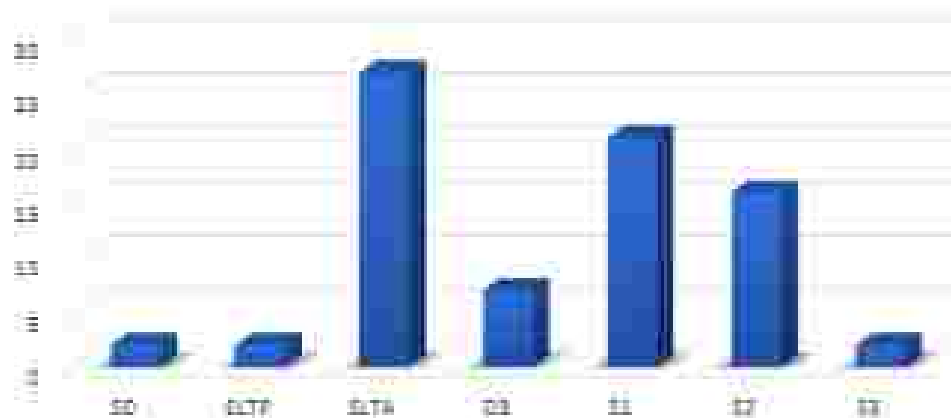


Gambar 3. Komposisi Pegawai PPPK BBPP Binuang Berdasarkan Golongan

Tingkat Pendidikan, terdiri atas: S3 (doktoral) sebanyak 2 orang, S2 (magister) sebanyak 16 orang, S1 (sarjana) sebanyak 21 orang, D3 (diploma) sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 27 orang, SLTP sebanyak 2 orang dan SD 2 orang. Komposisi pegawai BBPP Binuang Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 4.



Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 4. Komposisi Pegawai BBPP Bimuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1. Aspek Strategis

a. Sumberdaya Alam

- a) BBPP Bimuang berada di lahan yang telah bersertifikat seluas 11,51 Hektar yang dilengkapi dengan fasilitas instalasi lahan praktek, sehingga sangat representative dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian Teknis Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Tata Guna Air, serta kewirausahaan pertanian.
- b) Instalasi lahan praktek yang tersedia seluas 6,5 hektar dilengkapi dengan sistem irigasi semi teknis yang mengalir sepanjang tahun sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan praktek budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan tanaman musiman.
- c) Secara demografi BBPP Bimuang sangat strategis, mudah diakses melalui transportasi darat yang dekat dengan Ton Kota Provinsi Kalimantan Selatan dimana Kalimantan Selatan menjadi pintu masuk untuk semua provinsi di Kalimantan, serta Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru.

b. Sumberdaya Kelembagaan

a) Organisasi dan Tata Kerja

BBPP Bimuang merupakan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan Unit Kerja Dipimpin oleh seorang Kepala Balai terdiri dari :



Kepala Bagian Umum membawahi :

- Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha
- Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan BMN
- Ketua Tim Kerja Keuangan

Ketua Kelompok Substansi Program membawahi :

- Ketua Tim Kerja Program dan Kerjasama
- Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Laporan

Ketua Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan membawahi :

- Ketua Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur
- Ketua Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi, dan PLA

- b) Penguatan Kelembagaan Melalui Sertifikasi Integrasi Manajemen Mutu dan Manajemen Lingkungan (ISO 9001:2015, dan ISO 14001:2015)

Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), adalah bentuk konsisten manajemen untuk memberikan standard minimal terhadap pelayanan penyelenggaraan pelatihan pertanian di BBPP Bimuang secara konsisten, dan sertifikasi ISO 9001:2015 (manajemen mutu) mulai diterapkan dan diperoleh sertifikasinya sejak tahun 2007. Pada akhir tahun 2016 BBPP Bimuang telah mengintegrasikan sistem pelayanan tersebut dengan Sistem Manajemen Lingkungan, (Integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO 14001:2015) secara berkelanjutan.

Hasil audit merekomendasikan BBPP Bimuang meraih sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015, maka secara optimal dengan sumber daya yang tersedia untuk :

- Berkomitmen dalam usaha pencegahan pencemaran lingkungan.
- Berperan aktif dalam usaha pelestarian dan perbaikan alam.
- Senantiasa meningkatkan mutu pelayanan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Senantiasa memenuhi sasaran mutu dan lingkungan serta persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, memantau dan meningkatkan efektifitas sistem manajemen integrasi (ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015) secara berkelanjutan.
- Mengkomunikasikan system manajemen integrasi ini kepada seluruh personil BBPP Bimuang serta pihak-pihak yang berkepentingan.



c) **Lembaga Pelatihan Profesi**

Sejak tahun 2013 BBPP Binnang mendapat mandat dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Pemerintah, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk menyelenggarakan pelatihan Profesi baik bagi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian maupun non ASN. Pelaksanaan Sertifikasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2013 antara lain : Pelatihan Kompetensi Profesi yang berkaitan dengan Vokasi Produksi Benih Tanaman Padi, Vokasi Produksi Benih Tanaman Perkebunan, Vokasi Asintan, Vokasi Mandor Kebun Kelapa Sawit, Vokasi Fasilitator Pertanian Organik dan lain-lain.

d) **Tempat Uji Kompetensi (TUK)**

Sebagai Lembaga Pelatihan Profesi BBPP Binnang telah dapat penugasan untuk melaksanakan mandat Uji Kompetensi khusus bagi pejabat RIHP Penyuluhan Pertanian (Pertanian), yang dilaksanakan mulai tahun 2013 sampai sekarang.

e) **Penumbuhan dan pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)**

Tujuannya adalah pemberian pelayanan sekaligus penyediaan tempat pelatihan/magang pertanian bagi pelaku utama (non apartur) yang tidak mungkin diberikan pelayanan pelatihan/magang secara langsung di BBPP Binnang yang tersebar di perdesaan wilayah kerja BBPP Binnang, dan sejak tahun 2006 BBPP Binnang sampai saat sekarang telah membina dan mengklasifikasi sebanyak 158 unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar di wilayah kerja 5 (lima) Provinsi se- Kalimantan, dengan klasifikasi masing-masingnya sbb:

Tabel 1. Sebaran, Jumlah dan Klasifikasi P4S

No	Provinsi	Utama	Madya	Permula	Jumlah
1.	Kalimantan Selatan	0	8	29	37
2.	Kalimantan Tengah	2	9	29	40
3.	Kalimantan Timur	0	21	17	38
4.	Kalimantan Barat	4	5	18	27
5.	Kalimantan Utara	0	8	8	16
Total		6	51	101	158

Di Tahun 2015 terdapat penetapan penerima program bantuan penguatan kelembagaan P4S berupa sarana dan prasarana dengan target 8 lembaga dalam rangka penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai pusat penbelajaran petani dan untuk menunjang tugas dan fungsi P4S maka dipandang perlu untuk pemenuhan



sarana dan prasarana bagi P4S. Penerima program bantuan penguatan kelembagaan P4S direncanakan berupa proyektor, kursi kuliah, speaker wireless, meja rapat, dan lemari buku dll.

f) Inkubator Agribisnis sebagai Unit Pembelajaran Usaha

Inkubator Agribisnis merupakan bentuk lembaga yang dibentuk dan memiliki fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kewirausahaan stakeholders. Peranan inkubator bisnis sangat strategis sebagai unit yang fokus dalam meningkatkan atmosfer kewirausahaan di lingkungan stakeholders pertanian.

BBPP Bimuang memiliki Inkubator Agribisnis (IA) BBPP Bimuang, di mana tujuan pengembangan pusat inkubator agribisnis adalah:

- Menginkubasi para tenant sehingga mampu : (1). Memumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan; (2). Menerapkan pola manajemen usaha agribisnis; (3). Menerapkan kaidah kaidah bisnis dalam meningkatkan skala usaha dan pendapatan.
- Membantu mempercepat tumbuhnya pelaku usaha agribisnis yang andal dan mandiri.
- Membuka peluang lapangan kerja di bidang agribisnis sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

IA BBPP Bimuang sebagai wadah dalam bentuk divisi guna proses penyehatan (inkubasi) dan konsultasi bagi tenant sehingga menjadi pelaku usaha agribisnis yang mandiri dan andal berdasarkan kaidah bisnis yang bertanggung jawab dengan membangun budaya bisnis dan kebersamaan yang kuat, dalam mengelola sumberdaya secara optimal.

g) Sumberdaya Manusia

BBPP Bimuang didukung oleh 77 karyawan, dengan berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 46 orang aparat serta 31 orang aparat berstatus PPPK (data per 31 Desember 2025), yang terdiri atas 50 Aparat laki-laki dan 27 Perempuan. Selain itu didukung 1 PPPK Paruh Waktu dengan kontrak kerja per tahun.

h) Sumberdaya Teknologi

BBPP Bimuang memiliki ketersediaan alat mesin pertanian yang cukup memadai, mulai dari peralatan pra panen, pengolahan lahan, budidaya tanaman, panen, Pasca



Panen, dan sampai kepada pengolahan hasil pertanian, sehingga BBPP Binuang mampu melaksanakan pelatihan pertanian dari hulu sampai hilir.

Disamping itu, sarana prasarana yang dimiliki berupa bengkel alatiran dengan petugas teknisi alatiran untuk mengembangkan berbagai alat dan mesin yang tersedia, dapat memberikan peluang pengembangan kreatifitas pertanian, baik melalui modifikasi peralatan yang telah ada, maupun merancang peralatan baru yang tepat guna dan dibutuhkan oleh petani dengan biaya murah. Pengolahan Limbah Pertanian dan pembuatan pupuk kompos dan cair dari Kotoran ternak itik.

Pendukung fasilitas lainnya, juga diperkuat dengan tersedianya Perpustakaan dan fasilitas Informasi Teknologi melalui Web Site BBPP Binuang, perpustakaan on line, yang ditunjang dengan jaringan Wifi 24 jam.

c. **Sarana Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sampai dengan Tahun 2025 dimanfaatkan sebagai fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, meliputi: gedung kantor, aula utama beserta ruang kelas, *quart house*, asrama peserta, ruang makan, poliklinik, agri cafe mart, inkubator agribisnis, jalan kompleks, lahan praktek, saluran irigasi, gedung perpustakaan, musholla, sarana olah raga, lapangan parkir, green house, unit pengolahan pupuk organik, alat dan mesin pertanian, laboratorium penyuluhan, alat pengolahan hasil pertanian, kendaraan dinas serta operasional balai, laboratorium pengolahan hasil pertanian dan lain-lain.

2. **Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)**

Permasalahan yang dihadapi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan untuk peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan non aparatur pertanian adalah sebagai berikut :

a. **Aspek Kelembagaan**

- a) Sebagai UPT BBPP Binuang tidak memiliki kewenangan dalam pengembangan kelembagaan, sehingga sangat sulit untuk mengikuti pola-pola pengembangan kompetensi SDM yang menjadi tuntutan dunia kerja industri pertanian.
- b) Belum seluruh instalasi yang ada dapat mengakomodir kebutuhan kegiatan praktek peserta pelatihan, dalam mendukung optimalnya pelayanan penyelenggaraan pelatihan.



- e) Sebaran keberadaan P4S belum merata; sehingga ada beberapa Kabupaten di Provinsi se- Kalimantan (wilayah kerja) masih ada yang belum ada P4S nya, demikian pula dalam tingkat kemampuan pengelola P4S, masih banyak didominasi klasifikasi Pemula.
- d) Belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan sarana prasarana Pelatihan
- e) Belum optimalnya peran dan fungsi Inkubator Usahatani dalam mendukung penumbuhan usaha kecil pertanian dan pelatihan berbasis kewirausahaan pertanian.
- f) Mandat LDP dan TUK masih fokus pada beberapa bidang keahlian atau vokasi, belum mengarah sepenuhnya ke kompetensi (SSKNI) RIHP lainnya.
- b. Aspek Ketenagaan**
 - a) Terbatasnya kuantitas tenaga kepelatihan
 - b) Masih kurangnya motivasi untuk pengembangan diri Tenaga fungsional khususnya widyaiswara (kaji widya, karya tulis ilmiah, modul, jurnal, short course dll)
 - c) Belum proposionalnya penempatan tenaga pelatihan berdasarkan beban kerja dan kompetensi masing-masing petugas.
- c. Aspek Penyelenggaraan**
 - a) Standar mutu pelayanan Pelatihan telah menggunakan Sistem manajemen Mutu SMM ISO 9001 : 2015, dengan menggunakan instrumen SOP sebagai acuan instruksi kerja pelayanan, tetapi dalam implementasinya belum secara optimal dilaksanakan dan terkoreksi sebagai tindak lanjut perbaikannya, sehingga belum adanya revisi SOP untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
 - b) Belum jelasnya penjenjangan pelatihan (dasar, menengah dan lanjutan), sesuai Permentan No. 49 Tahun 2011 untuk pelatihan teknis maupun kewirausahaan.
 - c) Belum optimalnya peran dan fungsi P4S dalam pelayanan peningkatan SDM Petani sekitar melalui penyelenggaraan permagangan/pelatihan.
- d. Aspek Kerjasama**
 - a) Belum adanya regulasi terhadap pengelolaan biaya anggaran kerjasama sebagai dasar pengenaan tarif kerjasama baik Pelatihan maupun kegiatan pemanfaatan fasilitas kepelatihan.
 - b) Belum optimalnya pemanfaatan peluang kerjasama pelatihan dan permagangan, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.



e. **Aspek Pembiayaan**

- a) Pembiayaan belum sepenuhnya mengakomodir pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi balai.
- b) Terbatasnya pembiayaan belanja mengikat (rutin) dalam menangani kegiatan pemeliharaan dan operasional sehari-hari perkantoran.

D. **Isu Strategis**

Isu strategis yang saat ini berkembang dan kemungkinan besar dalam jangka waktu lima tahun ke depan akan mempengaruhi perkembangan pelaksanaan tugas BBPP Binuang dalam aspek penyelenggaraan pelatihan dan dukungannya terhadap pengembangan pembangunan pertanian yaitu pertanian ramah lingkungan, penganekaragaman produk pertanian, dan pertanian modern adalah :

1. Inisiatif food estate sebagai antiupasi terhadap gangguan ketahanan pangan negara-bangsa telah dimunculkan dalam dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024. Program Food estate bahkan sudah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Dengan program food estate diharapkan didapat kecukupan produksi swasembada melalui komoditi prioritas, yang meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam serta pertanian terintegrasi.
2. Optimalisasi lahan dan pembentukan brigade pangan merupakan dua strategi kunci yang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras. Program ini sejalan dengan visi Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional. *"Kedaulatan pangan adalah harga mati. Kita harus bisa swasembada pangan, khususnya beras. Petani adalah pahlawan kita, mereka yang harus kita dukung,"* tegas Menteri.
3. Isu perubahan iklim dapat menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah panjang, sehingga menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi sebesar 2,3 hingga 4,7 derajat Celsius di tahun 2100 akibat peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal ini adalah melalui Perjanjian Perjanjian Paris oleh 196 negara. Perjanjian ini merupakan bentuk komitmen dunia dalam memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim.



Dorongan positif juga berasal dari sektor-sektor usaha yang berkaitan Dengan Energi Baru Dan Terbarukan (EBT). Sektor EBT juga menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik lagi di masa depan. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Strategi ini juga akan membantu Indonesia dalam mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Terobosan-terobosan baru sangat diperlukan untuk bisa melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs ini, termasuk juga rekayasa teknologi di sektor pertanian.

4. Gerakan Tanam Pro Organik (Genta Organik) saat ini menjadi fokus utama EPPSDMP Kementerian Pertanian (Kementan), dalam memengaruhi tingkat produktivitas hasil pertanian di Indonesia melalui ketersediaan dan kecukupan pupuk serta mendorong para petani menggunakan pupuk organik dan hayati secara mandiri dan masif.
5. Smart Farming yang merupakan metode dalam upaya memajukan bisnis pertanian inovatif Berbasis Internet of Things (IoT). Dengan konsep smart farming ini memudahkan pelaku pertanian dalam mengecek suhu, fertiliser, pengairan dan pemupukan. Dalam upaya mencapai hal tersebut juga perlu diadakan sebuah kolaborasi antara teknologi dan SDM pertanian yang mampu memanfaatkan *artificial intelligence* (teknologi mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia).
6. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem integrasi pertanian yang menggabungkan beberapa sektor, seperti pertanian, peternakan dan sektor lain (perkebunan, perikanan, dan kehutanan) sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan konservasi lingkungan serta meningkatkan penghasilan rumah tangga pelaku pertanian.
7. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di Balai Besar Pelatihan Pertanian belum dapat memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh petugas fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian untuk melaksanakan tugasnya dalam upaya meningkatkan kemampuan produksi para petani dan pelaku usaha agribisnis.
8. Pelatihan yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kompetensi peserta untuk melakukan praktek karena terbatasnya prasarana dan sarana pelatihan.
9. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dalam bentuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur atau Sertifikat Telah Mengikuti



Pelatihan bagi non aparatur belum dapat dijadikan sebagai jaminan bagi aparatur maupun non aparatur yang berlatih untuk dapat bersaing dalam dunia kerja khususnya di kawasan Asia Tenggara.

10. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Pertanian aparatur maupun non aparatur dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dengan pelatihan vokasi pertanian meliputi vokasi fasilitator pertanian organik, vokasi penangkar benih, vokasi sayuran organik dan vokasi yang lain yang mendukung keterampilan petani dalam mengelola usahatani.

Berdasarkan isu strategis tersebut di atas, pelatihan yang diselenggarakan di BBPP Binuang Tahun 2025 akan lebih banyak diarahkan pada pelatihan Sistem pertanian terpadu, Gerakan Tanam Pro Organik (Genta Organik) serta Smart Farming dan pelatihan lain yang mendukung komoditas strategis serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Pelatihan seperti ini harus terintegrasi dengan praktek agribisnis yang dilaksanakan di BBPP Binuang secara berkesinambungan baik yang menghasilkan produk segar maupun hasil olahan. Prasarana dan sarana pelatihan yang diperlukan untuk kegiatan sistem pertanian terpadu haruslah ditingkatkan jumlah dan mutunya.

Dalam perancangan pelatihan penetapan Standar Kompetensi Kerja (SKK) akan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa pelatihan baik aparatur maupun non aparatur. SKK harus disusun oleh BBPP dengan melibatkan instansi asal peserta aparatur atau instansi Pembina peserta non aparatur dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka peningkatan daya saing purnawidya pelatihan diperlukan SDM Pertanian kepelatihan yang kompeten. Widyaiswara sebagai motor penggerak dalam proses pelatihan serta tenaga kepelatihan balai haruslah terlatih dan tersertifikasi sesuai spesialisasinya. Tenaga kepelatihan yang sangat menentukan mutu penyelenggaraan pelatihan perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan sesuai standar *Management of Training* (MOT) maupun *Training Officer Course* (TOC).

Dalam penyelenggaraan organisasi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang terdapat lingkungan strategis yang terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif.



1. Dalam konteks organisasi lingkungan internal positif yaitu **Kekuatan (*Strengths*)** yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang dalam pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian yaitu :
 - a. BBPP Binuang terletak pada lokasi strategis di tepi jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
 - b. BBPP Binuang memiliki sarana pelatihan berupa empat unit asrama full-AC dengan kapasitas tampung 120 orang, serta tiga ruang kelas belajar dan satu aula (full-AC).
 - c. BBPP Binuang menyelenggarakan pelatihan dengan metode pendekatan *Experiential Learning Cycle (ELC)* atau AKOSA (Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan) dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa *Andragogy* yang bersifat pembaharuan.
 - d. Tersedianya pedoman dan petunjuk pelaksanaan di dalam penyelenggaraan pelatihan dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian dan peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
 - e. Sistem manajemen BBPP Binuang telah tertata dengan adanya *Standard Operating Procedures (SOP)*.
 - f. Widyaiswara yang ada di BBPP Binuang telah mengikuti pelatihan metodologi pelatihan dan pelatihan teknis sesuai spesialisasinya.
 - g. Sejak tahun 2012 BBPP Binuang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2008. Tahun 2023 ini BBPP Binuang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2015 sudah diperbaharui.
2. Adapun lingkungan internal organisasi yang negatif yaitu **Kelemahan (*Weaknesses*)** dalam pelaksanaan kegiatan saat ini meliputi :
 - a. Sarana praktek untuk kegiatan pelatihan belum lengkap dan memadai.
 - b. Kompetensi pejabat struktural dan staf pelaksana belum sepenuhnya sesuai standar.
 - c. Jumlah widyaiswara belum memenuhi standar kebutuhan dan distribusi spesialisasinya tidak merata.
 - d. Kompetensi widyaiswara belum sepenuhnya tersertifikasi.



- e. Kurikulum dan metodologi pelatihan belum sepenuhnya terupdate sesuai perkembangan pengetahuan terbaru.
 - f. SOP belum diimplementasikan dengan baik.
 - g. Perubahan atau revisi SOP tidak dilaksanakan walaupun nomenklatur kinerja sudah berubah.
 - h. Budaya Kerja BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif belum sepenuhnya diterapkan oleh pejabat dan staf pelaksana.
 - i. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pelatihan belum prima.
3. Kemudian lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif yaitu **Peluang** (*Opportunities*) dalam kegiatan yaitu:
- a. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi lingkup pertanian di wilayah kerja BBPP Binnuang.
 - b. Kepercayaan pengguna jasa pelatihan terhadap kompetensi BBPP Binnuang dalam melaksanakan pelatihan.
 - c. Tersedianya dana pemerintah kabupaten dan provinsi di wilayah kerja untuk pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan BBPP Binnuang.
 - d. Terdapat Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah kerja BBPP Binnuang yang memiliki kemampuan yang baik untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pelatihan non aparatur.
4. Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif yaitu **Tantangan** (*Threats*) dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :
- a. Besarnya biaya transportasi peserta khususnya yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Selatan untuk menghadiri pelatihan di BBPP Binnuang.
 - b. Tuntutan kebutuhan pengguna jasa pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian yang semakin tinggi terhadap mutu pelatihan.
 - c. Sulitnya memperoleh tambahan tenaga kepelatihanannya khususnya widyaiswara yang berkualitas tinggi, baik melalui detasering pegawai maupun rekrutmen tenaga baru.

BBPP Binnuang sebagai lembaga pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang kompeten dan berkarakter, maka perlunya standarisasi lembaga sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 2/Permentan/SM.300/J/01/12 tanggal 9 Januari 2012, yang pada



gilirannya mampu bersinergi dengan lembaga pelatihan lainnya. Dan agar para penyelenggaranya (Widyaiswara dan tenaga kepelatihan lainnya) menjadi pengelola pelatihan yang berdaya saing dan bertaraf internasional, maka dibutuhkan Widyaiswara yang berkualitas sesuai dengan kompetensi dan spesialisasinya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara, kompetensi yang harus dimiliki oleh Widyaiswara meliputi: (i) kompetensi pengelolaan pembelajaran; (ii) kompetensi kepribadian; (iii) kompetensi sosial; dan (iv) kompetensi substantive.

Sedangkan penetapan spesialisasi Widyaiswara mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Standardisasi Tenaga Kepelatihan Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/J/12/11, dengan kekhasan pertanian diwajibkan memiliki 8 jenis spesialisasi yaitu: (i) Budidaya Tanaman; (ii) Pengelolaan Limbah Tanaman; (iii) Hama dan Penyakit Tanaman; (iv) Konservasi Lahan dan Klimatologi; (v) Mekanisasi Pertanian; (vi) Pasca Panen dan Teknologi Hasil Pertanian; (vii) Sosial Ekonomi Pertanian; dan (viii) Penyuluhan Pertanian. Sampai saat ini Widyaiswara dan tenaga kepelatihan yang ada di BPP Bimang sepenuhnya belum didukung oleh Widyaiswara dengan spesialisasi yang diperlukan.

Selain itu terkait Otonomi Daerah masih perlu menjadi pertimbangan, bahwa otonomi daerah adalah otoritas yang dimiliki daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan dan arah pembangunan didasarnya berdasarkan potensi yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan rakyatnya, demikian pula terhadap pembangunan sektor pertanian, bahwa hampir setiap Kabupaten/kota memiliki program sendiri dalam rencana pembangunannya.

Tugas UPT Badan PPSDMP Kementan adalah meminkronkan (linkage) program antara program pembangunan pertanian nasional dengan program yang diusung oleh masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, melalui kegiatan penyelenggaraan pelatihan pertanian dengan fokus wilayah berbasis program pembangunan pusat dan daerah.

E. Dukungan Anggaran

Untuk mendukung misi, tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Bimang, Pagu anggaran BBPP Bimang Tahun 2025 adalah sebesar Rp 6,744,536,000, menjadi 10,305,157,000 di bulan Februari 2025. Sedangkan di bulan April 2025 menjadi Rp



11,076,210,000. Di bulan September terjadi penambahan PAGU menjadi Rp 11,120,708,000 dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 2. Pagu Anggaran BRPP Bintang Tahun 2025

No	Uraian	PAGU (dalam Rupiah)
1	AEA - Koordinasi <i>Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monitoring, dan Pelaporan</i>	530,000,000
2	CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup <i>Sarana Pelatihan Pertanian</i>	241,370,000
3	PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM <i>Sertifikasi Profesi dan SDM</i>	
4	QDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga <i>Pemumbuhan dan Penguatan P4S</i>	
5	SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan <i>- Pelatihan Fokus Pertanian bagi Aparatur</i> <i>- Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur</i>	4,287,906,000
6	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal <i>Layanan Perkantoran</i>	6,041,432,000
	Total	11,120,708,000

Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail TA 2025 (FA Detail) menunjukkan besaran pagu anggaran BRPP Bintang adalah pada 6 akun kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 11,120,708,000. Sedangkan dalam akun Sertifikasi Profesi dan SDM Sertifikasi Profesi dan SDM Fasilitas dan Pembinaan Lembaga untuk Pemumbuhan dan Penguatan P4S tidak terdapat anggaran sehingga tidak dilakukan perhitungan.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis BBPP Binuang tahun tahun 2025–2029 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis tahun 2025–2029. Program kegiatan dan rencana aksi pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Visi

Dalam rangka mengembangkan tugas pokok yaitu melaksanakan dan mengembangkan teknik, pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Binuang menetapkan visi 2025–2029 mengacu kepada visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, maka visi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (BBPP) adalah:

"Sumber Daya Manusia Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045."

Berdasarkan visi Badan PPSPDMP 2025–2029 di atas, terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu SDM pertanian produktif, SDM pertanian maju, SDM pertanian mandiri dan SDM pertanian sejahtera. Keempat kata kunci tersebut menjelaskan *positioning* SDM pertanian sebagai *human capital* untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian dan Visi Nasional. SDM sebagai *human capital* merupakan perubahan paradigma pengelolaan SDM pertanian yang tidak memandang manusia sebagai faktor produksi namun sebagai modal penting dalam pembangunan pertanian ke depan. Penjelasan dari masing-masing kata kunci dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

a. SDM Pertanian Produktif

Kata kunci pertama bermakna SDM Pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga.

b. SDM Pertanian Maju

Kata kunci kedua bermakna SDM Pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.



c. SDM Pertanian Mandiri

Kata kunci ketiga bermakna SDM Pertanian yang tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan usaha.

d. SDM Pertanian Sejahtera

Kata kunci keempat bermakna SDM yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan SDM yang unggul dan modal organisasi yang proporsional. Agar arah kebijakan, kapasitas SDM, dan organisasi sebagai unsur pembentuk institusi dapat berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan penyelaratan dengan sistem nilai Badan PPSPMP, yaitu:

- Inklusif, bermakna setiap kebijakan dan program membuka ruang partisipasi bagi semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat luas.
- Profesional, bermakna seluruh kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan dengan standar kompetensi tinggi, berbasis ilmu pengetahuan, akuntabel, dan berintegritas.
- Modern, bermakna pengelolaan SDM pertanian dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi, dan pendekatan berbasis data agar adaptif terhadap tantangan masa depan.

2. Misi

Untuk dapat menjadi *Center of Excellence* dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing BBPP Binuang menetapkan misi 2023–2029 mengacu kepada misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, maka BBPP Binuang menetapkan misi sebagai berikut:

a. Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang :

Regenerasi merupakan upaya pembaharuan dan peningkatan kuantitas generasi muda yang tertatik dan memiliki komitmen untuk terlibat dalam sektor pertanian nasional. Dengan kondisi sektor pertanian yang dianggap tidak menarik oleh para generasi muda, mengubah persepsi untuk mendorong ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian merupakan jawaban atas kondisi petani nasional yang sudah menua. Tanpa adanya generasi muda, maka keberlangsungan sektor pertanian Nasional akan menghadapi masalah serius dimasa mendatang. Regenerasi tidak hanya penting untuk



keberlanjutan, lebih jauh lagi, regenerasi merupakan salah satu jawaban yang tepat untuk mengejar perkembangan teknologi pertanian. Dengan penguasaan dan pengetahuan teknologi yang lebih mumpuni, adopsi teknologi pertanian maju oleh petani muda lebih mudah dilakukan.

b. Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian

Peningkatan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM pertanian merupakan hal yang saling terkait. Dengan mengusung paradigma *human capital* dalam pengelolaan SDM Pertanian, maka perlu ada perubahan sudut pandang mengenai SDM Pertanian dari faktor produksi menjadi modal utama yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan sektor pertanian. Investasi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai SDM pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Jenis investasi terhadap SDM pertanian meliputi pengembangan kompetensi dan peningkatan kemandirian petani.

Pengembangan kompetensi berarti pengembangan terhadap pengetahuan, kemampuan dan sikap SDM pertanian. Dengan kompetensi yang berkembang maka metode penyelenggaraan pertanian yang dilakukan dapat lebih efektif. Peningkatan produktivitas merupakan salah satu hasil peningkatan kompetensi dimana SDM pertanian yang kompeten diharapkan dapat menghasilkan proses yang lebih efisien, dengan kata lain menghasilkan *output* yang lebih besar dengan *input* minimal. Peningkatan kemandirian adalah peningkatan kemampuan petani dan tenaga kerja di sektor pertanian untuk secara mandiri mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan usahanya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi eksternal. Kemandirian mendorong petani dapat mengambil keputusan yang efektif, menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pertanian serta berinovasi dalam menghadapi tantangan di lingkungan strategis sektor pertanian.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional

Misi ini merupakan bentuk kontribusi Badan PPSDMP terhadap implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Badan PPSDMP menyadari bahwa implementasi RB tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, lebih luas lagi, melibatkan seluruh unit kerja. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Badan PPSDMP diharapkan dapat meningkatkan



kualitas kerja dan kinerja secara bersamaan dan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan Visi Badan PPSDMP 2025 – 2029.

3. Tujuan

Sejalan dengan tujuan Badan PPSDMP tujuan yang dicapai oleh BBPP Bawang adalah

- a. Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa, yang diukur melalui indikator *Persentase desa yang mengalami peningkatan jumlah petani muda/milenial terhadap total desa*. Target indikator ini ditetapkan sebesar 22,03 persen pada tahun 2025 dan meningkat secara bertahap hingga 22,43 persen pada tahun 2029.
- b. Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani, yang diukur melalui indikator *Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas*. Target pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas ditetapkan sebesar 1 persen per tahun selama periode 2025–2029.
- c. Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional, yang diukur melalui indikator kinerja tata kelola organisasi, meliputi:
 - *Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor*, dengan target 88,5 persen pada tahun 2025 meningkat menjadi 89,5 persen pada tahun 2029;
 - *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* BPPSDMP, dengan target 90,00 pada tahun 2025 meningkat menjadi 91,00 pada tahun 2029;
 - *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* terhadap layanan BPPSDMP, dengan target 3,60 pada tahun 2025 meningkat menjadi 3,64 pada tahun 2029.

4. Sasaran Program

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Perumusan Sasaran Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dilakukan melalui penerjemahan Pokok Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029.

Kontribusi BPPSDMP terhadap pertumbuhan usaha tani nasional diterjemahkan ke dalam Sasaran Program “*Meningkatnya Kelas Kemampuan Pelaku Usaha Tani*” Sasaran ini merepresentasikan peningkatan skala dan kapasitas pelaku usaha tani dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sumber daya pendukung



lainnya, yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani dimaknai sebagai perubahan status usaha kelembagaan petani yang terverifikasi menunjukkan peningkatan kapasitas, kinerja, dan tata kelola sebagai hasil langsung intervensi kegiatan lingkup BPPSDMP. Peningkatan kelas tersebut mencerminkan usaha tani yang memiliki pendapatan lebih baik serta posisi bisnis yang semakin strategis dalam rantai nilai pertanian. Dalam konteks ini, sumber daya manusia pertanian menempati peran kunci sebagai pelaku usaha sekaligus aset utama dalam pengembangan inovasi dan bisnis pertanian, sehingga keberhasilan peningkatan kelas usaha tani sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang unggul, berjiwa kewirausahaan, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

5. Kebijakan Strategi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, kelembagaan, serta tata kelola birokrasi yang profesional. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan pertanian sekaligus memastikan keberlanjutan ketersediaan tenaga kerja pertanian yang berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Arah kebijakan BPPSDMP difokuskan pada dua pokok utama. Pertama, peningkatan pendapatan petani dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia, yang dioperasionalisasikan melalui strategi:

- a. Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani berbasis kompetensi melalui penyuluhan serta penguatan modal manusia (*human capital*) pertanian;
- b. Pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara di bidang pertanian, disertai penguatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional agar lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Kedua, penguatan tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional melalui implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean governance* dalam seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia pertanian pada periode 2025–2029 tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas tenaga kerja,



tetapi terutama pada peningkatan kualitas melalui penguatan kompetensi, integritas, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, dan perkembangan teknologi pertanian modern. Dalam kerangka ini, penyuluh pertanian diposisikan sebagai instrumen utama pembangunan di tingkat lapangan, sementara birokrasi yang bersih dan profesional menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif di bidang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian.

Pada periode 2025–2029, BPPSDMP berperan strategis sebagai penggerak utama regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang berintegritas. Peran tersebut diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional, khususnya peningkatan volume usaha pertanian dan terwujudnya kesejahteraan petani Indonesia secara berkelanjutan.

6. Program Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, target kinerja didefinisikan sebagai penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dan setiap indikator kinerja. Definisi tersebut berlaku untuk seluruh tingkatan indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, maupun indikator kinerja kegiatan. Penetapan target kinerja yang jelas diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran dapat diukur serta dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Oleh karena itu, setiap indikator kinerja harus dilengkapi dengan target kinerja yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai secara kuantitatif dalam periode Renstra.

Pendekatan perumusan target kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2025–2029 dilakukan melalui penerjemahan pohon kinerja Kementerian Pertanian. Pohon kinerja merupakan kerangka yang memetakan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya dalam lingkup Kementerian Pertanian. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan vertikal antara sasaran program BPPSDMP dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian, serta keselarasan horizontal antarprogram dan kegiatan dalam lingkup Kementerian Pertanian. Dengan demikian, target kinerja BPPSDMP disusun



selaras dengan kerangka pencapaian kinerja Kementerian Pertanian dan menjamin kontribusi langsung BPPSDMP terhadap perwujudan visi dan misi Kementerian Pertanian.

Tabel 3. Target Kinerja Badan PPSDMP 2025–2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sat.	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas	%	1	1	1	1	1
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP	Indeks	0,7798	0,7800	0,7802	0,7804	0,7806

Berdasarkan Tabel 3 kinerja BPPSDMP periode 2025–2029 dijabarkan ke dalam satu sasaran program, yaitu “*Meningkatnya Kelas Kemampuan Pelaku Usaha Tani*.” Pencapaian sasaran program tersebut diukur melalui satu indikator kinerja program, yaitu “*Pertumbuhan Pelaku Usaha Tani yang Naik Kelas*,” dengan satuan persentase (%). Target pertumbuhan ditetapkan sebesar 1 persen per tahun secara konsisten mulai tahun 2025 hingga 2029. Penetapan target ini mempertimbangkan kondisi awal (baseline) pelaku usaha tani, karakteristik proses kenaikan kelas usaha yang bersifat bertahap dan memerlukan waktu, serta kapasitas intervensi BPPSDMP yang berfokus pada peningkatan kompetensi, perubahan perilaku usaha, dan penguatan kelembagaan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas proses tersebut, target 1 persen per tahun ditetapkan sebagai target yang realistis, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kredibilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Sasaran program dan indikator kinerja tersebut merepresentasikan upaya peningkatan skala usaha pertanian secara berkelanjutan. Indikator “pelaku usaha tani yang naik kelas” mengukur persentase pelaku usaha tani yang berhasil meningkatkan kapasitas atau kategori skala usahanya ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelumnya. Kenaikan kelas usaha tidak hanya mencerminkan peningkatan volume atau nilai usaha, tetapi juga



menunjukkan perbaikan dalam aspek manajerial, akses pasar, adopsi teknologi, serta keberlanjutan usaha. Dengan demikian, peningkatan kelas usaha tani dipandang sebagai indikator antara yang relevan dalam mendorong peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usaha tani.

Istilah "kelas" dalam konteks usaha tani merujuk pada klasifikasi tingkat kemampuan atau kapasitas usaha tani berdasarkan kriteria dan instrumen pengukuran yang ditetapkan. Klasifikasi ini digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pelaku usaha tani dalam mengelola usahanya, khususnya dari aspek skala bisnis dan kinerja usaha. Melalui klasifikasi tersebut, perkembangan pelaku usaha tani dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis dari waktu ke waktu, sehingga intervensi program dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.

Cakupan usaha tani dalam sasaran program ini meliputi berbagai subsektor pertanian, antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, dengan jenis kegiatan usaha yang mencakup penyediaan sarana produksi, kegiatan budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran, serta jasa penunjang di bidang pertanian. Seluruh cakupan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani dilaksanakan secara komprehensif, mencakup seluruh rantai nilai sektor pertanian dari hulu hingga hilir.

Dengan penetapan sasaran dan indikator kinerja tersebut, BPPSDMP mendorong transformasi pelaku usaha pertanian menuju skala usaha yang lebih tinggi secara bertahap dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Kementerian Pertanian, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan kesejahteraan petani serta pelaku agribisnis secara berkelanjutan.

Selain sasaran program tersebut, BPPSDMP juga menetapkan sasaran strategis di bidang tata kelola birokrasi, yaitu *"Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan BPPSDMP yang Baik, Transparan, dan Akuntabel"*. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui *Indikator Kinerja Sacaran Strategis "Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan BPPSDMP"*.

Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas tata kelola birokrasi BPPSDMP secara komprehensif, mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas proses bisnis, serta kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi. Target Indeks Tata Kelola Birokrasi BPPSDMP ditetapkan meningkat secara bertahap dari 0,7798 pada tahun 2025 menjadi 0,7806 pada tahun 2029, yang mencerminkan komitmen BPPSDMP



dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap tata kelola organisasi.

Penetapan target indeks secara gradual mempertimbangkan karakteristik reformasi birokrasi sebagai proses perubahan struktural dan kultural yang memerlukan waktu, konsistensi kebijakan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan pencapaian sasaran strategis tata kelola tersebut, BPPSDMP diharapkan mampu menyediakan fondasi birokrasi yang profesional dan berintegritas sebagai prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan pengembangan usaha tani.

Dengan demikian, sasaran program dan sasaran strategis BPPSDMP 2025–2029 dirancang saling melengkapi, di mana peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani sebagai sasaran substantif didukung oleh penguatan tata kelola birokrasi sebagai sasaran pendukung. Keterpaduan kedua sasaran tersebut menjadi landasan bagi kontribusi BPPSDMP terhadap pencapaian visi Kementerian Pertanian secara berkelanjutan.

7. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program Tahun 2025 adalah peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian dengan kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah :

- a. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur
- b. Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur
- c. Layanan Dukungan Manajemen Internal, termasuk dukungan teknis lainnya seperti penyelenggaraan kebun praktik
- d. Pelatihan Brigade Pangan

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja dituangkan kedalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala BSPP Binaung untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang ditetapkan dengan rincian perjanjian sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian



Binnang Selanjutnya disebut pihak pertama dengan Kepala Badan Penulisan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua melakukan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian tersebut, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Unit Eselon I : Badan PPSDMP
Unit Eselon IIb : BBPP Binnang
Tahun Anggaran : 2025

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnang Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	1. Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	20
		2. Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	25
2.	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	3. Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	4 (Skala likert 1-5)
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Binnang	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Binnang	90,00
4.	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Binnang	3,60 (Skala likert 1-4)



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun 2025 - 2029.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BBPP Binuang dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Tahun 2025 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) Sangat Berhasil (capaian > 100%), (2) Berhasil (capaian 80-100), (3) Cukup Berhasil (capaian 60-80%) dan (4) Kurang Berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead Indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II menggunakan jenis indikator *output*. Sehingga Perjanjian Kinerja (PK) eselon II menggunakan *Lag Indicator*.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.



Capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Bimuang Tahun 2025 diuraikan masing-masing tiap sasaran strategis dan indikator kinerja meliputi Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025, Analisis Nilai Kinerja Anggaran dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja beserta capaian kinerja lainnya. Berikut disampaikan uraian capaian kinerja.

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Unit Eselon I : Badan PPSDMP
Unit Eselon IIb : BBPP Bimuang
Tahun Anggaran : 2025

(A) Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan

Indikator Keberhasilan : Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) dan (non aparatur)

Indikator Kinerja adalah Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) dan (non aparatur) tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) (Permendagri No. 36/2017). Sedangkan indikator kinerja sasaran kegiatan adalah indikator keluaran (*output*) yang mencerminkan kinerja capaian dari pelaksanaan kegiatan pada BBPP Bimuang.

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	1. Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	20 %	19,41	Memenuhi Target
		2. Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	25 %	24,70	Memenuhi Target

Berdasarkan Tabel 5 sasaran kegiatan meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan), dengan indikator kinerja sasaran kegiatan berupa rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) dengan capaian 19,41 dari target 20% (Memenuhi Target).



Sedangkan indikator kinerja sasaran kegiatan berupa meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan) dengan rata - rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian non aparatur dengan capaian 24,70 dari target 25% (Memenuhi Target).

Selain itu BBPP Binaung telah melakukan pelatihan sebanyak 15.286 Peserta yang Mengikuti Pelatihan, dengan rincian capaian Peserta yang meningkat Kompetensinya sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Persentase Peserta Yang Meningkatkan Kompetensinya

No	Nama Pelatihan	Peserta yang Mengikuti Pelatihan	Peserta yang meningkat Kompetensinya	Persentase (%)	Capaian
1.	Pelatihan Dasar Bagi Pengawas Benih Tanaman Ahli	15	14	93,33 %	Mencapai Target
2.	Training of Trainers (TOT) Mendukung Brigade Pangan bagi Penyuluh Pertanian Pendamping Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	30	28	93,33 %	Mencapai Target
3.	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan	15.241	13.755	90,25 %	Mencapai Target
	Jumlah	15.286	13.797	90,26 %	Mencapai Target

Berdasarkan Tabel 6 Persentase Peserta Yang Meningkatkan Kompetensinya sebesar 13.797 peserta dari target 15.286 peserta atau mencapai 90,26 % (Mencapai Target).



(B) Meningkatnya Kepuasan Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan

Indikator Keberhasilan : Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan

Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Indeks Kepuasan Peserta Pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
2.	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	3. Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	4 (Skala likert 1-5)	4,56	Memenuhi Target

Berdasarkan Tabel 7 sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan dengan capaian 4,56 dari target 4 (skala likert 1-5) (Memenuhi Target).

(C) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran BBPP Binuang

Indikator Keberhasilan : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Binuang

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran BBPP Binuang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Binuang	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Binuang	90,00	97,37	Memenuhi Target

Berdasarkan Tabel 8 sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Binuang dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Binuang dengan capaian 97,37 dari target 90,00 (Memenuhi Target).



a. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung misi, tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Bimang, Pagu anggaran BBPP Bimang Tahun 2025 adalah sebesar Rp 11.144.723.000 dengan rincian capaian sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Anggaran BBPP Bimang

No	Uraian	PAGU (Rupiah)	Realisasi (Des)	Persen
1.	AEA - Koordinasi Koordinasi Sosialisasi, Bimtek, Money, dan Pelaporan	550.000.000	549.976.583	100 %
2.	CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kebutuhan dan Lingkungan Hidup Sarana Pelatihan Pertanian	241.370.000	240.842.451	99,78 %
3.	PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM Sertifikasi Profesi dan SDM	-	-	0
4.	QDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Pemumbuhan dan Penguatan P4S	-	-	0
5.	SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan - Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur - Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	4.287.906.000	4.287.546.491	99,99 %
6.	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	6.065.447.000	6.062.418.52	99,95 %
	Total	11.144.723.000	11.140.784.047	99,96 %

Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail TA 2025 (FA Detail) menunjukkan besaran pagu anggaran BBPP Bimang adalah pada 4 akun kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 11.076.210.000 di mana realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercapai Rp 11.140.784.047 atau sebesar 99,96 %.

Sedangkan dalam akun (3) Sertifikasi Profesi dan SDM dan (4) Fasilitas dan Pembinaan Lembaga untuk Pemumbuhan dan Penguatan P4S tidak terdapat anggaran sehingga tidak dilakukan perhitungan.

b. Analisis Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) BBPP

Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

Berdasarkan aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id>, capaian Tahun 2025 sebesar 97,37 dari target 90,00 dengan kriteria Memenuhi Target.

(D) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPP Binnang

Indikator Keberhasilan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPP Binnang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini



ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/MPAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.050/4/2019 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu :

1. Persyaratan pelayanan, yaitu ketentuan untuk mendapatkan suatu jenis pelayanan publik yang meliputi persyaratan administrasi dan teknis.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi pelayanan publik dan penerima pelayanan publik termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik.
4. Biaya/tarif Pelayanan, yaitu biaya atau tarif yang dikenakan.
5. Kesesuaian Produk Pelayanan, yaitu kesesuaian Produk yang dikeluarkan dengan aturan yang telah ditetapkan.



6. Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian petugas dalam melayani ataupun menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan, yaitu sikap dan perilaku petugas secara ramah dan sopan serta menghormati dan menghargai masyarakat.
8. Kualitas Sarana dan Prasarana, Yaitu kondisi sarana dan prasarana yang baik dan layak digunakan.
9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil survei SKM dan Nilai Rata - Rata (NRR) pada Tahun 2025 dengan 110 responden yang diperoleh dari 9 indikator unsur pelayanan, dengan nilai rata-rata sebagai berikut:

Tabel 10. Pengolahan Data Kuisioner IKM

Perhitungan	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai Per Unsur	435	436	438	437	433	434	435	436	433
Nilai Rata Rata Per Unsur	3.95	3.96	3.96	3.97	3.94	3.95	3.95	3.96	3.94
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur (NRR per unsur x 0.1111)	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)	98.85	3.95							
Mutu Pelayanan	A	Sangat Baik							

Keterangan :

- U1 : Persyaratan
- U2 : Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
- U3 : Waktu Penyelesaian
- U4 : Biaya/Tarif
- U5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- U6 : Kompetensi Pelaksana
- U7 : Perilaku Pelaksana
- U8 : Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
- U9 : Sarana Dan Prasarana

Dari data tersebut terlihat bahwa dengan Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BBPP Binuang per 31 Desember Tahun 2025 sebesar 98,85 atau 3,95 dalam skala likert, dengan jumlah responden survey sebanyak 110 orang.



Tabel 11. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kepuasan Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
4.	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Bimuang	3,60 (Skala likert 1-4)	3,95	Memenuhi Target

Berdasarkan Tabel 11 sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Bimuang dengan capaian 3,95 dari target 3,60 (Skala likert 1-4) (Memenuhi Target).

C. Capaian Perjanjian Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator outcome, capaian kinerja kesepakatan kinerja perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Bimuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, ditetapkan dengan rincian capaian Tahun 2025.

Tabel 12. Realisasi Perjanjian Kinerja BBPP Bimuang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	1. Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	20	19,41	Memenuhi Target
		2. Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	25	24,70	Memenuhi Target
2.	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	3. Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	4 (Skala likert 1-5)	4,56	Memenuhi Target
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Bimuang	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Bimuang	90,00 %	97,37	Memenuhi Target



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
4.	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Binnuang	5,60 (Skala Indekt 1-4)	3,95	Memenuhi Target

Berdasarkan Tabel 12 target IKSK 1 s.d 4 berupa Sasaran Strategis (A) s.d (D) telah memenuhi semua target sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain 4 (empat) Sasaran Strategis perjanjian kinerja tersebut, yakni (A) Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan), (B) Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan, (C) Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Binnuang, (D) Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan terdapat Capaian Kinerja Lainnya. Capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

BBPP Binnuang selain menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPP juga menggunakan dana PNBP. Kegiatan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan melalui bendahara Penerima PNBP meliputi Penerimaan Umum dan Fungsional. Penerimaan Umum meliputi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai; Barang Modal TA yang laku.

Sedangkan Pendapatan Fungsional meliputi Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya; Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi. Perkiraan Penerimaan PNBP untuk Penerimaan Pendapatan Layanan Pendidikan dan atau Pelatihan. Capaian kinerja penerimaan PNBP Tahun 2025 berdasarkan laporan realisasi PNBP satuan kerja BBPP Binnuang sebesar Rp.437.013.357.

2. Kerjasama

Kerjasama Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diselenggarakan oleh BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) bersama BBPP Binnuang (Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnuang) diselenggarakan Juli tahun 2025 di Binnuang, Kalimantan Selatan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kelapa sawit, serta kesejahteraan petani. Adapun peserta petani pekebun dari Kabupaten Tanah Bumbu,



Kalimantan Selatan, dengan materi: pelatihan mencakup persiapan lahan, persiapan benih dan tanam, pemeliharaan tanaman, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta praktik lapangan di kebun percontohan.

3. Prestasi / Apresiasi Institusi Eksternal Terhadap Layanan BBPP Binnuang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PANRB Tahun 2025

Berdasarkan SK MenPAN-RB Nomor B/174/PP.00.05/2025, tentang PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI KIPP TAHUN 2025 Proposal Inovasi BIO D'Corp AGRO (BIODA) dari BBPP Binnuang lolos seleksi administrasi dengan nomor urut 291 untuk melanjutkan ke tahap penilaian proposal yang akan dilakukan oleh Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun 2025.

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Status	Tipe Instansi
288	Inovasi Ayam KUB, Inovasi Agribusi Pemulung Sampahkota Pagar Negeri	Kementerian Pertanian	Balai Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Aneka Ternak	Local	Kementerian/Lembaga
289	INOVASI BIO D'Corp AGRO (BIODA)	Kementerian Pertanian	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnuang	Local	Kementerian/Lembaga
290	Inovasi Dendeng Ayam dari Karkas Ayam, Inovasi Dendeng Ayam dari Karkas Ayam, Inovasi Dendeng Ayam dari Karkas Ayam	Kementerian Pertanian	Balai Besar Pelatihan dan Modernisasi Peternakan	Local	Kementerian/Lembaga
291	Low Cost Smart Irrigation System (Sistem Irigasi Pintar dan Modern)	Kementerian Pertanian	Balai Penelitian Pertanian Lirisana	Local	Kementerian/Lembaga
294	Modul Penerapan Padi Jajar Legowo Lirisana Transformatif	Kementerian Pertanian	Balai Besar Pelatihan dan Modernisasi Sekeloa Peternak	Local	Kementerian/Lembaga

Penghargaan sebagai Inovator pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025

BBPP Binnuang meraih penghargaan dari BPPSDMP Kementan sebagai Inovator pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025. Penghargaan ini diterima oleh Dr. Atekan, S.P., M.Si., selaku Kepala Balai BBPP Binnuang.

4. Program Swasembada Pangan Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat

Optimasi Lahan (OPLAH) adalah usaha untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya dukung lahan, sehingga lahan tersebut dapat digunakan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan Cetak Sawah Rakyat (CSR) merupakan program utama tahun 2025 untuk memperluas lahan produksi padi dan jagung guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Target pelaksanaan fisik dan tanam program ini telah dimulai di berbagai daerah, seperti di Sumatera Selatan dengan kontrak yang melibatkan pihak pengembang.

For more information, call 1-800-368-5868
or visit www.fishbase.org

[illegible]

Journal of Management Inquiry 20(6)p. 798-811
© The Author(s) 2011
Reprints and Permissions:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

43



terhadap kapasitas kepemimpinan serta peran strategis BBPP Binnuang dalam mendukung program prioritas pembangunan pertanian nasional.

E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 sudah terlaksana dengan baik namun masih mengalami hambatan/kendala yaitu :

- a. BBPP Binnuang siap untuk mensupport program urgensi Kementerian Pertanian dalam menyongsong kegiatan pertanian sepanjang tahun 2025, lewat sejumlah rencana program dan kegiatan mempercepat swasembada pangan dengan gerakan LTT, yaitu Bimbingan Teknis Bagi Petani dan Penyuluh Mendukung Peningkatan Produktivitas Padi dan Jagung Pelatihan Subsistem Biodidaya / Usahatani. Selain itu untuk memperkuat Perluasan Areal Tanam (PAT) terutama komoditas padi BBPP Binnuang melakukan koordinasi dan eksekusi program PAT guna menyatukan persepsi dan komitmen bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan pempanisasi di lahan sawah untuk meningkatkan produksi padi nasional.
- b. BBPP Binnuang terus mengadakan tema pelatihan terupdate dengan perubahan kultur, seperti antisipasi darurat pangan dan *climate change* yang menjadi eviden kuat Kementerian Pertanian untuk memberikan kepedulian kepada insan pertanian dalam isu darurat pangan.
- c. Sesuai arahan BPPSDMP Kementan dalam memberdayakan sektor pertanian beserta *stakeholders* milenial yang terlibat bahwa petani milenial mempunyai peran penting dalam melanjutkan pembangunan disektor pertanian. Melalui pelatihan regenerasi petani milenial diharapkan mampu menghasilkan wirausahawan muda pedesaan serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian yang tangguh dan berkualitas di area kerja Kalimantan pada khususnya. Untuk mencapai produktivitas pertanian yang tinggi, hal utama yang paling utama yaitu tersedianya SDM Pertanian yang unggul, andal, profesional, dan mandiri serta berjiwa entreprenur tinggi.
- d. Guna menggalang dukungan Instansi terkait yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelatihan berbasis program dan wilayah dimana pesertanya dominan berasal dari wilayah Kabupaten/Kota setempat, maka optimalisasi fungsi koordinasi dan sosialisasi menjadi sangat penting perannya sebagai upaya untuk penyamaan persepsi terhadap penyiapan SDM dalam melaksanakan program pembangunan khususnya pertanian wilayah, dan diharapkan akan mendorong dukungan



yang berujung partisipasi aktif semua jajaran di pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Demikian pula terhadap kemungkinan adanya share biaya dalam peningkatan SDM di daerah, dapat juga menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk sense daerah untuk peduli terhadap peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian, sehingga pada gilirannya pelaksanaan program pembangunan pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Kota akan menjadi gerakan bersama antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan khususnya di sektor pertanian.

- a. Kami juga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kota untuk menggali dan meningkatkan potensi pertanian di daerah masing-masing, termasuk juga kelembagaan P4S. Dengan demikian setiap daerah mampu dan dapat membuat proyeksi kebutuhan pangan dalam jangka menengah panjang demi mengantisipasi tantangan perubahan iklim yang mengancam produksi dan rantai pasok pangan ke depan.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BBPP Binuang Tahun 2025 ini merupakan pelaporan serangkaian kegiatan beserta kinerja BBPP Binuang sebagai UPT Badan PPSDMP Kemantan dengan wilayah kerja se-Kalimantan. Dalam rentang periode Januari s.d. Desember Tahun 2025, realisasi anggaran Tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp 11,144,723,000 tercapai Rp 11,140,784,047 atau sebesar 99,96 %.

Hasil pengukuran kinerja/kesepakatan kinerja-perjanjian kinerja antara Badan PPSDMP Kemantan dan BBPP Binuang untuk mewujudkan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja sebagai berikut: (A) Sasaran kegiatan meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan), dengan indikator kinerja sasaran kegiatan berupa rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) dengan capaian 19,41 dari target 20% (Memenuhi Target) dan Sedangkan indikator kinerja sasaran kegiatan berupa meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan) dengan rata – rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian non aparatur dengan capaian 24,70 dari target 25% (Memenuhi Target).; (B) Sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan dengan capaian 4,56 dari target 4 (skala likert 1-5) (Memenuhi Target); (C) Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Binuang dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Binuang dengan capaian 97,37 dari target 90,00 (Memenuhi Target).; (D) sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Binuang dengan capaian 3,95 dari target 3,60 (Skala likert 1-4) (Memenuhi Target). Dengan demikian BBPP Binuang telah Memenuhi Target semua sasaran strategis perjanjian kinerja.

Sedangkan capaian indikator kinerja lainnya sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 437.013.357; (2) Kerjasama program pelatihan dengan Badan Pengelola Duna Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta (3) Prestasi BBPP Binuang lolos seleksi administrasi dengan nomor urut



291 untuk masuk ke tahap penilaian proposal yang akan dilakukan oleh Tim Evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Demikian Laporan Kinerja BBPP Binuang Tahun 2025 disusun sebagai instrumen monitoring kinerja BBPP Binuang sebagai unit kerja Badan PPSDMP Kementan. Kami berharap laporan tersebut dapat dipergunakan dengan baik sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atsakan
Jabatan : Batai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Idha Widi Arsanti
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

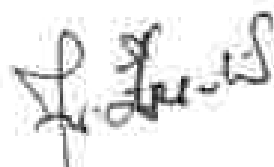
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 30 Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Idha Widi Arsanti



Atsakan

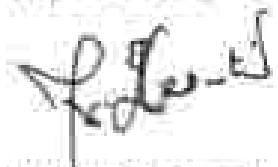
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	1. Persentase surti ber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	97,50 %
2.	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	2. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,60 skala-likert (1-4)
3.	Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Mandiri Zona Integritas BBPP Binuang	60 Nilai
4.	Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) BBPP Binuang	95,16 Nilai

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Rp. 865,550,000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Rp. 6,107,808,000
Jumlah		Rp. 6,973,456,000

Binuang, 30 Desember 2024

Kepala Badan


Idha Widi Arsanti

Kepala Balai


Atokan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Atekan
Jabatan : Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Idha Widi Arsanti
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 26 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Idha Widi Arsanti


Atekan

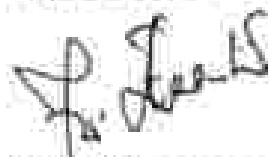
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**

NO	SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SABARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	1. Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	97,50 %
2.	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	2. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,60 skala-likert (1-4)
3.	Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Mandiri Zona Integritas BBPP Binuang	80 Nilai
4.	Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Binuang	95,16 Nilai

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Rp. 5,079,278,000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSOMP	Rp. 6,107,908,000
Jumlah		Rp. 11,187,186,000

Binuang, 26 Februari 2025

Kepala Badan


Idha Widi Arsanti

Kepala Balai


Atokan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atakan
Jabatan : Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Idha Widi Arsanti
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

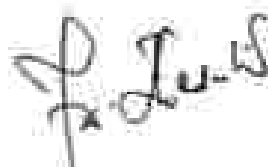
seleku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 25 September 2025

Pihak Kedua



Idha Widi Arsanti

Pihak Pertama



Atakan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	1. Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	97,50 %
2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	2. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,50 skala-likert (1-4)
3	Terwujudnya Bincrase BBPP Binuang yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3. Nilai Mandiri Zona Integritas BBPP Binuang	50 Nilai
4	Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Binuang	95,18 Nilai

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Rp. 5,079,276,000
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Rp. 6,152,406,000
Jumlah		Rp. 11,231,682,000

Binuang, 25 September 2025

Kepala Badan:


Idha Widi Arsanti

Kepala Balai:


Atakan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alekan

Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Idha Widi Arsanti

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binuang, 31 Desember 2025

Pihak Kedua:

Idha Widi Arsanti

Pihak Pertama:

Alekan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	1.	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	20,00 %
		2.	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	25,00 %
2.	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	3.	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	4,0 (Skala likert 1-5)
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Binuang	4.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Binuang	90,00 Nilai
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Binuang	5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Binuang	3,60 (Skala likert 1-4)

NO	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Pertanian	Rp	5.079.276,000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Rp	6.176.421,000
	Jumlah	Rp	11.255.697,000

Binuang, 31 Desember 2025

Kepala Badan,

Idha Widi Arsanti

Kepala Balai,



Alekan



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG

JALAN JEND. ACH. YANI KM. 95 BINUANG - KAB. TAPIN - PROP. KALIMANTAN SELATAN 71123
TELEPON/FAX : 0511 - 36007, 36076 EMAIL : trppa.binuang@gmail.com
WEBSITE : <http://www.trppbinuang.trppedmp.pertanian.go.id>



CAPAIAN IKSK UPT PELATIHAN DESEMBER 2025
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG

No	Nama Pelatihan	Peserta yang Mengikuti Pelatihan	Peserta yang meningkat Kompetensinya	Persentase (%)	Capaian
1	Pelatihan Dasar Bagi Pengawas Benih Tanaman Ahli	15	14	93,33%	Mencapai Target
2	Training of Trainers (TOT) Mendukung Brigade Pangan bagi Penyuluh Pertanian Pendamping Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	30	28	93,33%	Mencapai Target
3	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan	15.141	13.755	90,23%	Mencapai Target
	Jumlah	15.186	13.797	90,26%	Mencapai Target

Binuang, 31 Desember 2025

Kepala Balai

N. Shaban, SP, M.Si
NIP. 19710061993031001

**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**

Sasaran Kegiatan (IKSK 1) Meningkatkan Kompetensi Peserta Pelatihan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	20 %	19,41	Memenuhi Target
		2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	25 %	24,70	Memenuhi Target

Binuang, 31 Desember 2025


 Kepala Balai

 Dr. Agus W. SP, M. Si
 NIP. 19721006199031001

PENGHITUNGAN CGI PELATIHAN NON APARATUR TAHUN 2024

No	Nama Pelatihan	Standar Kompetensi Kerja (%)	Kemampuan (%)	Produk Kemampuan	Nilai PK (%)	Nilai dan Perilaku (%)	Nilai Kompetensi (%) (Jumlah No 1-7 Tahun 2024) $(50\% \times 8) + (50\% \times 6) = (50\% \times 14)$	Produk Kompetensi (Jumlah No 1-7 Tahun 2024)	Hasil CGI (%)	Target CGI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelatihan Peningkatan Tenaga Kompetensi Brigade Pangan Kabupaten Bantul Kelas Angkatan 9	100	77.48	Terampil	77.44	74.41	74.54	Baik	25.44	25
2	Pelatihan Peningkatan Tenaga Kompetensi Brigade Pangan Kabupaten Bantul Kelas Angkatan 39	100	89.84	Sangat Terampil	87.27	79.93	74.14	Baik	25.84	25
3	Pelatihan Peningkatan Tenaga Kompetensi Brigade Pangan Kabupaten Bantul Kelas Angkatan 59	100	84.28	Sangat Terampil	72.49	77.86	74.01	Baik	23.99	25
4	Pelatihan Peningkatan Tenaga Kompetensi Brigade Pangan Kabupaten Bantul Kelas Angkatan 65	100	82.27	Sangat Terampil	66.83	71.69	72.24	Baik	21.73	25
5	Pelatihan Peningkatan Tenaga Kompetensi Brigade Pangan Kabupaten Bantul Kelas Angkatan 99	100	80.18	Sangat Terampil	72.08	73.90	74.62	Baik	25.38	25
499	Pelatihan Peningkatan Tenaga Kompetensi Brigade Pangan Kabupaten Bantul Angkatan 31	100	80.70	Sangat Terampil	77.54	75.12	76.26	Baik	21.71	25
RATA-RATA			80.31	Sangat Terampil	73.61	75.38	75.18	Baik	24.78	25

PENGHITUNGAN CGI PELATIHAN APARATUR TAHUN 2025

No	Nama Pelatihan	Skor Kompetensi Kerja (%)	Keterampilan (%)	Predikat Keterampilan	Nilai PK (%)	Skor dan Predikat (%)	Nilai Kompetensi (%) Gakuin No 137 Tahun 2024	Predikat Kompetensi (Gakuin No 137 Tahun 2024)	Hasil CGI (%)	Target CGI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Training Of Trainers (ToT) Bagi Pensuluh Pendamping Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan I	100	82.11	Sangat Terampil	72.97	85.00	76.68	Baik	23.12	20
2	Training Of Trainers (ToT) Bagi Pensuluh Pendamping Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan II	100	88.19	Sangat Terampil	82.21	85.00	83.96	Sangat Baik	16.04	20
3	Pelatihan Dasar Bagi Pengawas Rerita Tumbuhan Asli	100	90.00	Terampil	75.99	85.00	78.54	Baik	21.46	20
4	Training of Trainers (TOT) Mendukung Brigade Pangan bagi Pensuluh Perantara Pendamping Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	100	72.21	Terampil	59.44	85.00	59.40	Baik	20.60	20
5	Training of Trainer Brigade Pangan Bagi Wilayah Kota, Desa, Kota dan Pensuluh Mendukung Brigade Pangan	100	80.28	Sangat Terampil	85.17	85.00	84.36	Sangat Baik	15.64	20
RATA-RATA			80.34	Sangat Terampil	79.14	85.00	80.59	Sangat Baik	19.41	20

Binuang, 31 Desember 2025

Kepala Batai



Dr. Aida, SP. MSA

NIP. 1971061999031001

**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**

Sasaran Kegiatan (IKSK 2) : Meningkatkan Kepuasan Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
2	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	3. Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	4 (Skala likert 1-5)	4,56	Memenuhi Target

Binuang, 31 Desember 2025

Kepala Balai



Dr. Nurul SP, M.Si

NIP. 19731006199031001

PENGHITUNGAN SASARAN KEGIATAN MENINGKATNYA KEPUASAN PESERTA PELATIHAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELATIHAN TAHUN 2025

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	L.P 9	L.P 10	Rata - Rata (skala 5)	Rata - Rata (skala 4)
1	Training Of Trainers (TOT) Bagi Penyuluh Pendamping Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan I	28,29 dan 30 Juli 2025	4.77	4.41	4.56	3.65
2	Training Of Trainers (TOT) Bagi Penyuluh Pendamping Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan II	28,29 dan 30 Juli 2025	4.45	4.40	4.43	3.54
3	Pelatihan Dasar Bagi Pengurus Desa/ Kelurahan Abdi	08 - 30 Juli 2025	4.43	4.61	4.53	3.61
4	Training of Trainers (TOT) Mendukung Brigade Pangan bagi Penyuluh Pertanian Pendamping Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	11 -19 Maret 2025	4.50	4.43	4.46	3.57
5	Training of Trainer Brigade Pangan Bagi Widyaiswara, Dosen, Guru dan Penyuluh Mendukung Brigade Pangan	3- 7 February 2025	4.71	4.48	4.60	3.68
6/8	Pelatihan Penyuluh Tematik Kompeten Brigade Pangan Kabupaten Banjar Angkatan 73	22 - 24 Oktober 2025	4.66	4.78	4.71	3.77
	Rata - Rata				4.56	3.65

Bimaung, 31 Desember 2025
Kepala Balai


Dr. Nurhikmah, S.P., M.Si
NIP. 196211041999031001

**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**

Sasaran Kegiatan (IKSK 3): Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran BHPB Binuang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BHPB Binuang	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BHPB Binuang	90,00 %	97,37	Memenuhi Target

Binuang, 31 Desember 2025

Kepala Balai

D. Aslan, S.P., M.Si
NIP. 197210061099031001

PERHITUNGAN SASARAN KEGIATAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN BBPP BINUANG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DALAM BESAR PELATIHAN PERTAMUAN BINUANG, KALSIEL

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai Dengan: 1000000000

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subur	Uraian Subur	Keterangan	Estimasi Pelaksanaan Anggaran		Estimasi Pelaksanaan Anggaran				Estimasi Total Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Persentase Pelaksanaan	Diserahkan SPM (Pemerintah)	Nilai Akumulatif Pelaksanaan Anggaran
						Revisi DPA	Revisi Pelaksanaan H 2025	Pengeluaran Anggaran	Saluran Anggaran	Pengeluaran Tagihan	Pengeluaran LP dan TUP	Capaian Output				
1	102	200	220000	DALAM BESAR PELATIHAN PERTAMUAN BINUANG, KALSIEL	Mula	100.00	00.00	00.00	0.00	100.00	00.00	100.00	10.00	90%	0.00	0.00
					Akhir	00	00	00	00	00	00	00				
					Saldo Awal	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00				
					Saldo Akhir	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00				

Binnang, 31 Desember 2025

Kepala Balai

Dr. Arifin, S.P., M.Si
NIP. 19711000199031001

**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**

Sasaran Kegiatan (IKSK 4) : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPP Binuang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
4.	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPP Binuang	1,60 (Skala Ikert 1-4)	3,95	Memenuhi Target

Binuang, 31 Desember 2025


 Kepala Balai
 Dr. Arhan, SP, M.Si
 NIP. 19730061940031001

Pengolahan Data Kuisiner IKM BBPP Binuang Semester II Tahun 2025

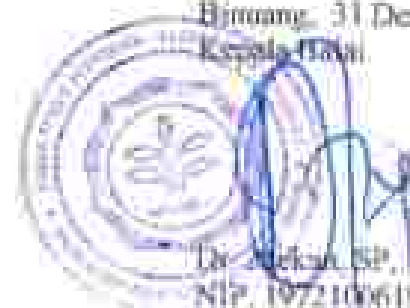
Perhitungan	Nilai Per Uraian Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai Per Uraian	435	416	420	417	433	434	415	425	437
Nilai Rata-Rata Per Uraian	1.55	1.50	1.60	1.57	1.64	1.61	1.51	1.56	1.64
Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Uraian (NRR: per uraian x 9,1111)	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
IKM Uraian Pelayanan (Total NRT x 25)	98.85	98.85							
Nilai Pelayanan	A	Sangat Baik							

Keterangan:

- U1 : Persyaratan
- U2 : Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
- U3 : Waktu Pelayanan
- U4 : Biaya/Tarif
- U5 : Petugas Spesifikasi Jenis Pelayanan
- U6 : Kompetensi Petakarya
- U7 : Perilaku Petakarya
- U8 : Peningkatan Pelayanan, Saran Dan Masukan
- U9 : Sarana Dan Prasarana

Binuang, 31 Desember 2025

Kepada Yth.



Dr. Ariefah, SP., M.Si

NIP. 197210061999031001